



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KPKNL
AMBON

LAPORAN KINERJA 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I	3
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	3
B. SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA	5
C. PERMASALAHAN UTAMA	9
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	10
BAB II	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
B. PENETAPAN KINERJA	14
C. PENGUKURAN KINERJA	15
BAB III	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. EVALUASI KINERJA KEGIATAN	20
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV	27
PENUTUP	27
A. SIMPULAN UMUM	27
B. LAMPIRAN	28

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja KPKNL Ambon disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Ambon di tahun 2021 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.01/2016, dan telah diubah kembali dengan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Ambon memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Ambon tahun 2021 ini kiranya masih terdapat banyak kekurangan, ke depannya akan kami lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Laporan Kinerja KPKNL Ambon tahun 2021 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran yang dibebankan kepada KPKNL Ambon pada tahun anggaran 2021.

Ambon, Januari 2022

Kepala KPKNL Ambon



Ditandatangani secara elektronik

Iwan Victor Leonardo



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon merupakan salah satu instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tugas dan fungsi serta struktur organisasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Ambon mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan Peta Strategi :

- a. Stakeholder / Costumer Perspective yang mencakup:
 1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
 2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
 3. Pengelolaan lelang yang optimal
- b. Internal Process Perspective yang mencakup :
 1. Manajemen Pelayanan yang Berkualitas;
 2. Tata Kelola Kekayaan Negara yang Akuntabel;
 3. Penilaian yang berkualitas ;
 4. Tata kelola lelang yang efektif;
 5. Edukasi yang Efektif;
 6. Pengawasan dan pngendalian yang efektif
- c. Learning and Growth Perspective yang mencakup :
 1. SDM yang Kompeten;
 2. Organisasi yang fit-for-purpose;
 3. Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

3. Registrasi penerimaan berkas ,penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL;

KPKNL Ambon berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan Negara Lt. IV), Ambon, memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Prov. Maluku yang terdiri dari 2 (dua) Kota dan 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu :

1. Kota Ambon
2. Kota Tual
3. Kabupaten Maluku Barat Daya
4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar (dh. Kabupaten Maluku Tenggara Barat)
5. Kabupaten Kepulauan Aru
6. Kabupaten Maluku Tenggara
7. Kabupaten Maluku Tengah
8. Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Kabupaten Seram Bagian Timur
10. Kabupaten Buru Selatan
11. Kabupaten Buru Utara

B. SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

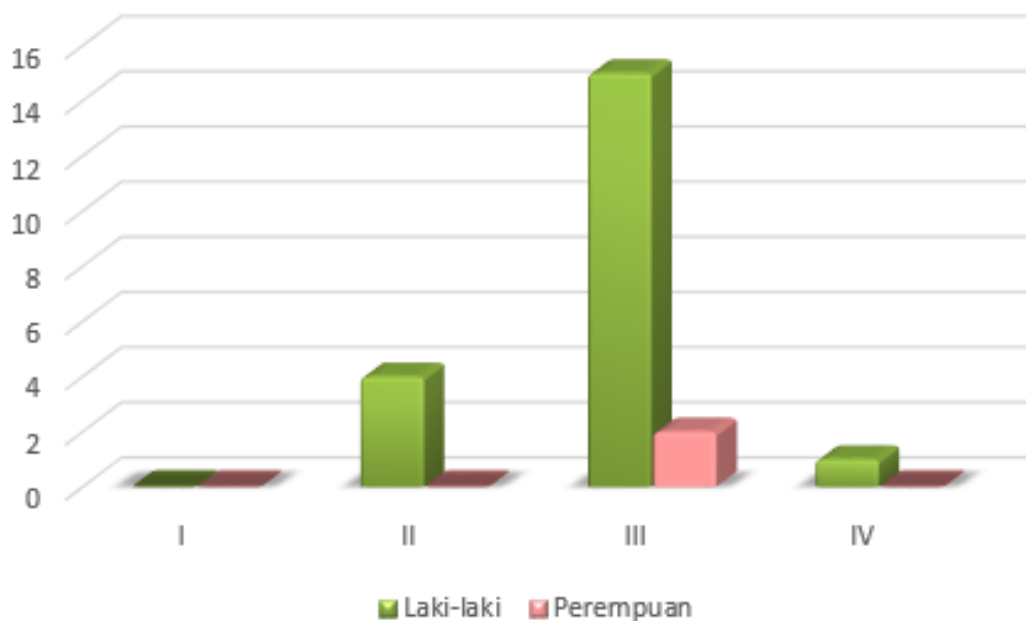
Sumber Daya Manusia sebagai unsur yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Ambon berjumlah 22 (dua puluh dua) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Ambon dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai KPKNL Ambon sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 22 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total orang
1	I	-	-	-
2	II	4	0	4
3	III	15	2	17
4	IV	1	-	1

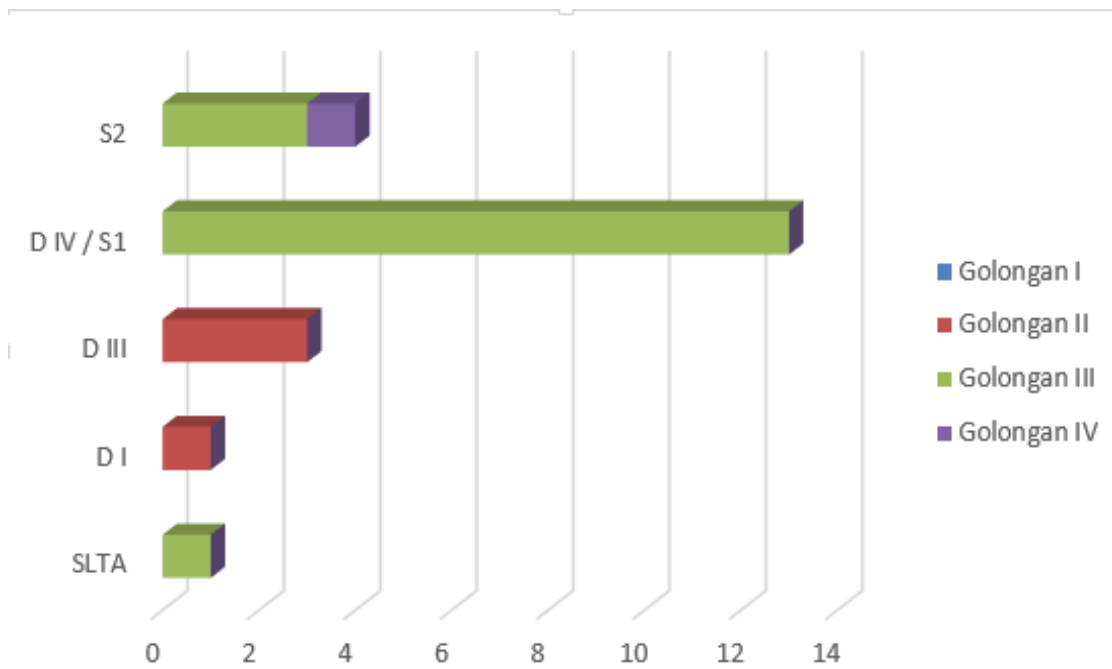


b. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jml	Eselon			
		Peg	II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	-
2	Subbagian Umum	5	-	-	1	4
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	4	-	-	1	3
4	Seksi Piutang Negara	3	-	-	1	2
5	Seksi Hukum dan Informasi	3	-	-	1	2
6	Seksi Kepatuhan Internal	2	-	-	1	1
7	Kelompok Jabatan Fungsional	4	1	3	-	-
Total		22	1	4	5	12

c. Berdasarkan Pendidikan

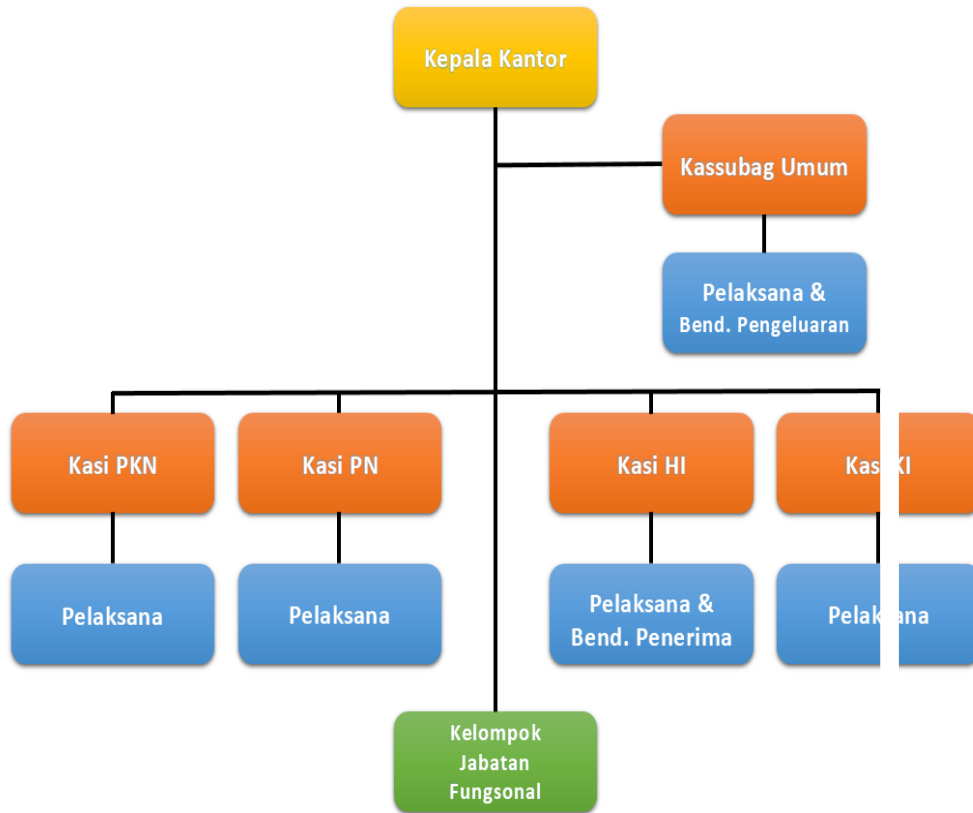
No	Unit Kerja	Jml	Golongan			
		Peg	I	II	III	IV
1	SLTA	1	0	0	1	0
2	D I	1	0	1	0	0
3	D III	3	0	3	0	0
4	D IV / S1	13	0	0	13	0
5	S2	4	0	0	3	1
Total		22	0	4	17	1



d. Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pelelang/Pejabat Lelang	3
2	Penilai Kekayaan Negara	0
3	Juru Sita Piutang Negara	1
4	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
Jumlah		4

Struktur organisasi KPKNL Ambon dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL Ambon

Penjelasan struktur organisasi KPKNL Ambon :

1. Kepala Kantor, eselon IIIA;
Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), eselon IVA, dengan 5 (lima) orang^a. termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran; pelaksana
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), eselon IVA, dengan 2 (dua) orang pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), eselon IVA, dengan 3 (tiga) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;
6. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Kasi KI), eselon IVA, dengan 1 (satu) orang pelaksana.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. SARANA DAN PRASARANA

KPKNL Ambon berlokasi di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan Negara Lt. IV), Ambon. Ruang kerja yang digunakan oleh KPKNL Ambon adalah salah satu ruang Gedung Keuangan Negara Ambon di Lantai 4 yang digunakan sejak tahun 1995 dengan luas ruang kantor 1.572 m² dengan pembagian ruang kerja sebagai berikut :

1. Ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu, ruang Kepala KPKNL, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Sekretariat, ruang Server, ruang BKPN, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang Bendahara Penerimaan, ruang Arsip dan ruang dapur (*Pantry*) serta kamar mandi/toilet;

Disamping itu, KPKNL Ambon memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

- Kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 (satu) unit
- Kendaraan operasional sebanyak 2 (dua) unit roda empat dan 4 (empat) unit sepeda motor
- Komputer (PC) sebanyak 27 unit, laptop 14 unit, Note Book 1 unit dan printer sebanyak 30 unit, at DJKN);
- Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 8 (delapan) unit yang berdiri diatas dua bidang tanah KPKNL Ambon, yang berstatus Hak Pakai. Rumah dinas tersebut terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala kantor ukuran 70 m² dan 7 (tujuh) unit Rumah Dinas untuk kasubbag umum dan para kepala seksi dengan ukuran masing-masing 50 m².

C. PERMASALAHAN UTAMA

- Wilayah kerja KPKNL Ambon yang cukup luas dan berupa kepulauan di Provinsi Maluku serta pulau-pulau kecil dan jauh lainnya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menjangkaunya.
- Potensi lelang yang ada masih belum dapat dioptimalkan, karena kurangnya minat peserta lelang untuk mengikuti penjualan barang. Hal ini merupakan dampak dari minimnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait lelang seperti penyediaan dan peningkatan fasilitas layanan pada ruang layanan, penyediaan fasilitas hotline lelang, dan membuat banner-banner informasi proses pelaksanaan lelang, sehingga memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam mengakses layanan lelang.
- Tidak disampaikannya data PNBPN Pemanfaatan dan Cost-Having (Hibah) oleh satuan kerja berakibat pada tidak tercapainya realisasi nominal PNBPN aset walaupun secara akumulasi, IKU terkait persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dapat tercapai

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja KPKNL Ambon Tahun 2021 ini kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika pelaporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar kinerja tahun 2021.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas keuangan yang dipergunakan.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, dan lampiran berupa kontrak kinerja Kepala KPKNL Ambon tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1. Visi

KPKNL Ambon dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mempunyai visi dan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KPKNL yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan. Visi KPKNL Ambon mengikuti visi yang telah ditetapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu :

“MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT”

Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Ambon dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan kedalam phrasa sebagai berikut :

- a. **Pengelola Kekayaan Negara** adalah sebagai lembaga/institusi pemerintah yang berusaha memenuhi kebutuhan para *stakeholder* dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.
- b. **Profesional** dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.
- c. **Akuntabel** dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

A.2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan misi, yang terdiri dari :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari visi dan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai KPKNL adalah :

1. Pengamanan dan pengembalian keuangan Negara, serta memberi kontribusi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) melalui biaya administrasi pengurusan piutang Negara dan bea lelang;
2. Pelayanan Lelang;
3. Pelayanan Kekayaan Negara;
4. Pelayanan Penilaian Kekayaan Negara;
5. Pembinaan Sumber Daya Manusia;

A.4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Dalam menentukan sasaran yang akan dicapai diupayakan sasaran dimaksud serealistis mungkin dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh KPKNL Ambon adalah :

1. Mempercepat penyelesaian kasus Piutang Negara dan pencapain target;
2. Terciptanya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan minimalisasi perkara hukum;
5. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan Negara;
6. Melaksanakan penilaian kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan nilai wajar kekayaan Negara;
7. Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi KPKNL Ambon.

A.5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran. Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Ambon meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang Negara
2. Peningkatan pengelolaan barang jaminan
3. Peningkatan kualitas pelayanan lelang
4. Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
5. Optimalisasi barang milik Negara
6. Penilaian kekayaan Negara
7. Peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Ambon

A.6. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan yang dijalankan oleh KPKNL Ambon diuraikan dalam program sebagai berikut :

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang Negara;
2. Pengaman barang jaminan;
3. Percepatan pelayanan lelang;
4. Mengoptimalkan sistem administrasi data PPLN;
5. Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
6. Pelayanan di bidang kepegawaian;
7. Pelayanan di bidang keuangan;
8. Pelayanan di bidang umum;
9. Tertib administrasi barang milik Negara;
10. Pemanfaatan barang milik Negara;
11. Penilaian barang milik Negara.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Ambon harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Ambon. Sasaran Strategis KPKNL Ambon Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Ambon tersebut di atas.

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2019, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a). Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Ikhtisar capaian kinerja IKU pada KPKNL Ambon Tahun 2021 dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Kode	IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Indeks Max. 120%
Stakeholder Perspective (25%)				28,18%
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal			112,74%
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	63,26%	102,03%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%	143,99%	120%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	159%	120%
Customer Perspective (15%)				16,47%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa			116,50%

2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	89 (Skala 100)	99,72	112,04%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	169,11%	120%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien			103,10%
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,4 (Skala 5)	4,54	103,10%
Internal Process Perspective (30%)				32,50%
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			104,73%
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	96,22%	96,22%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	2,28%	120%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			112,93%
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	103,03%	103,03%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%	62,03%	120%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional	92%	100%	108,70%

	Auction			
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5%	0%	120%
6	Edukasi yang Efektif			100,28%
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	89,25	100,28%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif			115,43%
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	98,11%	115,43%
Learning & Growth Perspective (30%)				34,03%
8	SDM yang Kompeten			120%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
9	Organisasi yang Fit For Purpose			120%
9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75	89,26	120%
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	99	120%
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal			100,25%

10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,74	100,25%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				111,18%

B. EVALUASI KINERJA KEGIATAN

1. Indikator Kinerja

Dari pengukuran indikator kinerja yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa Seluruh kegiatan telah melebihi dari target diatas 100% dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang 120%
- b. Tingkat outstanding piutang Negara 120%
- c. Persentase Pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 102,032%
- d. Indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL 103,10 %
- e. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara dan Lelang 112,04%
- f. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan 96,22%
- g. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN 103,03%
- h. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio Aset) 100%
- i. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian 120,00%
- j. Persentase Produktivitas Lelang 120,00%
- k. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction 108,70%
- l. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 100,28%
- m. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara 115,43%
- n. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai 120,00%
- o. Nilai Review Pengelolaan Kinerja 120,00%
- p. Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator 120%
- q. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 100,25%

Apabila dibandingkan dengan target pada Renstra KPKNL Ambon Tahun 2015 – 2020, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja memiliki *trend* capaian peningkatan yang signifikan.

2. Rencana Aksi 2022

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi dan mitigasi risiko yang telah disusun berdasarkan analisa dalam pelaksanaan tugas, maka disusunlah rencana aksi untuk dijadikan sebagai *benchmark* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021. Rencana aksi direview setiap triwulan untuk melihat apakah setiap rencana aksi berjalan dengan lancar dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Rencana aksi yang telah dilakukan KPKNL Ambon pada triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Aplikasi NADINE;
- b. Akan terus melakukan koordinasi dengan pihak BPN baik melalui rapat-rapat virtual maupun komunikasi via telepon.

Rencana aksi yang telah dilakukan KPKNL Ambon pada triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi yang baik dan efektif dengan satuan kerja terkait Permohonan yang di ajukan;
- b. Koordinasi secara berkelanjutan dengan satuan kerja;
- c. Sosialisasi Crash Program Keringanan Utang.

Rencana aksi yang telah dilakukan KPKNL Ambon pada triwulan III tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. permintaan melalui media elektronik (WA dan Telpon) juga masih terus dilakukan.
- b. Berkoordinasi dengan satker dan memberikan pemahaman terkait perbedaan nilai taksiran dan nilai wajar serta pemahaman tentang hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
- c. Berkoordinasi dengan satker untuk percepatan proses pengumpulan form pendataan reval dgn mengadakan vicon

- d. Membuat LPK revisi dari form pendataan yang sudah ada sehingga ketika akan dilakukan pembuatan tiket, nilai sudah siap upload

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan melalui Indikator Kinerja kegiatan yang ada dibiayai dari DIPA Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Capaian Keluaran Dan Capaian Komponen

Keluaran / Komponen	Target	Satuan	Capaian			
			s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan II	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV
Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara sesuai Kewenangan KPKNL		Dokumen				
Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara *)	15	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	25	52	78	100
Kajian Standar Barang Standar Kebutuhan	338	Aset	324	336	338	338
Penilaian terkait Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyusunan DKPB, serta Uji Kompetensi Penilai		Laporan Penilaian	9	18	8	16
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang PKN	89	Laporan Pelaksanaan Tugas	77,72	85,47	83,12	89,25
Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah	529	Jumlah Bidang Tanah yang Disertifikatkan	17	17	27	509
Pelaksanaan Evaluasi Portofolio Aset	27	Aset	17	22	27	27

Layanan Pengurusan Piutang Negara sesuai Kewenangan KPKNL		Dokumen				
Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara *)	32	Dokumen	3	26	1	2
Pelaksanaan Penilaian atas Barang Jaminan	0	Laporan Penilaian	0	0	0	0
Penyelenggaraan Kesekretariatan PUPN Cabang	2	Laporan	0	1	0	1
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Piutang Negara	4	Laporan Pelaksanaan Tugas	1	1	1	1
Layanan Lelang sesuai Kewenangan KPKNL		Risalah Lelang				
Identifikasi dan Verifikasi atas Permohonan Lelang		Surat Persetujuan / Penolakan	55	102	140	182
Pelaksanaan Lelang dan Pembuatan Risalah *)		Risalah Lelang	48	88	111	158
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Lelang	89	Laporan Pelaksanaan Tugas			80,5	89.34
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan				
Layanan Perkantoran		Layanan				

2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021

A. Data Bobot dan Capaian IKPA

Indikator IKPA	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator IKU	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Pengelolaan U/P	8%	100,00%	8,00%	8%	100,00%	8,00%	8%	100,00%	8,00%	8%	100,00%	8,00%
Data Kontrol	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%
Kesalahan SPM	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Ratur SP2D	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Hal II DIPA	5%	100,00%	5,00%	5%	96,28%	4,81%	5%	92,05%	4,60%	5%	85,28%	4,26%
Revisi DIPA	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%
Kinerja Capaian Output	17%	100,00%	17,00%	17%	72,78%	12,37%	17%	90,07%	15,31%	17%	99,76%	16,96%
Rakon LPU	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Perencanaan Kas	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
Realisasi	15%	100,00%	15,00%	15%	100,00%	15,00%	15%	100,00%	15,00%	15%	100,00%	15,00%
Papir Minus	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Total	86%		86%	86%		80%	86%		83%	86%		84%
Total Nilai Akhir IKPA		100,00%			84,88%			87,80%			86,18%	

B. Nilai SMART DJA

Indikator	Bobot	Capaian s.d. Triwulan III		Capaian s.d. Triwulan IV (tahunan)	
		Capaian Indikator	Capaian Tertimbang	Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincinan Output	43,50%	0,00%	0,00%	100,00%	43,50%
Efisiensi	28,60%	0,00%	20,09%	5,45%	22,41%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,20%	0,00%	0,00%	98,36%	17,90%
Penyerapan Anggaran	9,70%	0,00%	0,00%	95,56%	9,27%
CAPAIAN SMART DJA			20,09%		93,08%

3. Konsistensi Rencana Penarikan Dana

BULAN	RPD (Belanja Barang dan Belanja Modal)	REALISASI PENYERAPAN BULAN INI (Belanja Barang dan Belanja Modal)	 RPD - REALISASI 	KONSISTENSI BULANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	0	0		-
Februari	0	0		-
Maret	0	0		
April	78.125.244	72.290.348	5.834.896	92.53
Mei	112.077.599	116.277.500	(4.199.901)	94.39
Juni	130.411.998	130.398.445	13.553	96.26
Juli	90.797.297	57.701.882	33.095.415	88.08
Agustus	76.843.210	76.843.210	0	90.46
September	162.980.503	162.980.510	(7)	92.05
Oktober	149.648.998	120.015.687	29.633.311	90.36
November	137.386.429	68.263.753	69.122.676	85.28
Desember	137.386.429	68.263.753	69.122.676	85.28
CAPAIAN INDIKATOR KONSISTENSI				85.28

4. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		99,18%
1.	Pengelolaan UP	8,00%
2.	Data Kontrak	10,00%
3.	Kesalahan SPM	5,00%
4.	Retur SP2D	5,00%
5.	Hal III DIPA	4,26%
6.	Revisi DIPA	5,00%
7.	Penyelesaian Tagihan	10,00%
8.	Kinerja Capaian Output	16,96%
9.	Rekon LPJ	5,00%
10.	Perencanaan Kas	0,00%
11.	Realisasi	15,00%
12.	Pagu Minus	5,00%
13.	Dispensasi SPM	5,00%
B) Nilai SMART		93,08%
Capaian Triwulan IV		95,52%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja KPKNL Ambon ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Ambon sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon ditetapkan berdasarkan peta strategis Kemekeu-Three yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah disampaikan pada BAB III. rata-rata pencapaian kinerja KPKNL Ambon (NKO) tahun 2021 sebesar **111.18%%** yang berarti pencapaian kinerja di atas 100%. Dari 17 IKU yang ditetapkan. 16 (enam belas) IKU berwarna hijau dan 1 (satu) IKU berwarna kuning. Pencapaian NKO meningkat dari tahun 2021 demikian keberhasilan yang dicapai oleh KPKNL Ambon sudah menunjukkan bahwa telah semakin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran KPKNL Ambon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I. bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi. dengan bekerja lebih giat lagi serta terus menerus mengamalkan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik. bahkan terus berusaha untuk meningkatkannya.

B. LAMPIRAN

NILAI KINERJA ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON PERIODE TRIWULAN I

TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q1	Realisasi Q1	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective(25%)								16,08%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							64,30%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L							abu-abu
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	10%	19,52%	14%	50%	195,17%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDP s.d 2017)	P/M	25%	2%	14%	50%	8,60%	8,60%	merah
Customer Perspective(15%)								14,65%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							97,68%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	89,00	99,87	11%	44%	112,21%	112,21%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	20%	17,25%	14%	56%	86,26%	86,26%	kuning
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien								
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M							abu-abu
Internal Process Perspective (30%)								32,44%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							120,00%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L							abu-abu
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	15%	62,96%	11%	44%	419,75%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,00%	14%	56%	200,00%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							96,26%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	25%	9,09%	14%	25%	36,36%	36,36%	merah
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	15%	51,11%	14%	25%	340,74%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conve	P/M	92%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	12,5%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif								
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M							abu-abu
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif								
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M							abu-abu
Learning & Growth Perspective (30%)								36,00%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	15%	62,61%	14%	100%	417,39%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M							abu-abu
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	99	14%	100%	123,63%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							120,00%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	144,27%	14%	100%	151,06%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								99,17%	kuning

NILAI KINERJA ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON PERIODE SEMESTER I

TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q2	Realisasi Q2	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
Stakeholder Perspective(25%)								30,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							120,00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	50%	63,03%	19%	40%	126,055%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	30%	74,55%	14%	30%	248,507%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	50%	62%	14%	30%	124,11%	120,00%	hijau
Customer Perspective(15%)								17,48%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,55%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	89,00	99,82	11%	44%	112,16%	112,16%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	40%	91,28%	14%	56%	228,20%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien								
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M							abu-abu
Internal Process Perspective (30%)								30,47%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							73,08%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	20%	2,27%	19%	43%	11,34%	11,34%	merah
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	45%	62,96%	11%	25%	139,92%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	3,03%	14%	32%	186,23%	120,00%	hijau
5	Penerapan tata kelola Piutang Negara dan Lelang							117,17%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	50%	90,91%	14%	25%	181,82%	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	20%	54,55%	14%	25%	272,73%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conve	P/M	92%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,5%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							96,04%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	85,47	14%	100%	96,04%	96,04%	kuning
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							120,00%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	40%	69,23%	14%	100%	173,08%	120,00%	hijau
7b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	P/M							abu-abu
Learning & Growth Perspective (30%)									
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	40%	98,26%	14%	100%	245,65%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M							abu-abu
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M							abu-abu
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	99	14%	100%	123,31%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							#VALUE!	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	94,93%	14%	100%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
10b-N	Persentase tindak lanjut temuan BA 15	P/M							abu-abu
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								77,95%	merah

NILAI KINERJA ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON PERIODE s.d. Triwulan III

TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target Q3	Realisasi Q3	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (25%)							26,83%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							107,30%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	55%	63,26%	19%	40%	115,018%	115,02%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	60%	99,00%	14%	30%	164,994%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDP s.d 2017)	P/M	75%	63%	14%	30%	84,14%	84,14%	kuning
	Customer Perspective (15%)							17,48%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,55%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	89,00	99,83	11%	44%	112,17%	112,17%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	70%	118,35%	14%	56%	169,07%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien								
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M		4,48					abu-abu
	Internal Process Perspective (30%)							30,82%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							80,43%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	60%	17,01%	19%	43%	28,36%	28,36%	merah
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	75%	100,00%	11%	25%	133,33%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	1,96%	14%	32%	191,09%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang							117,17%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	75%	90,91%	14%	25%	121,21%	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	25%	61,26%	14%	25%	245,05%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conve	P/M	92%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	12,5%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							93,40%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	83,12	14%	100%	93,40%	93,40%	kuning
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							120,00%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	40%	69,23%	14%	100%	173,08%	120,00%	hijau
7b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang di tindaklanjuti	P/M							abu-abu
	Learning & Growth Perspective (30%)							32,55%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	75%	108,33%	14%	100%	144,44%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M							abu-abu
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M		86,00					abu-abu
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	99	14%	100%	123,88%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							85,48%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	81,63%	14%	100%	85,48%	85,48%	kuning
10b-N	Persentase tindak lanjut temuan BA 15	P/M							abu-abu
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								107,68%	hijau

NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON TAHUN 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective (25%)							28,18%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							112,74%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	63,26%	19%	40%	102,032%	102,03%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	143,99%	14%	30%	143,986%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	159%	14%	30%	159,20%	120,00%	hijau
	Customer Perspective (15%)							16,47%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116,50%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	89,00	99,72	11%	44%	112,04%	112,04%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	169,11%	14%	56%	169,11%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							103,10%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,40	4,54	21%	100%	103,10%	103,10%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							32,50%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							104,73%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	96,22%	19%	43%	96,22%	96,22%	kuning
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100,00%	11%	25%	100,00%	100,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	2,28%	14%	32%	189,66%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							112,93%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	103,03%	14%	25%	103,03%	103,03%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	62,03%	14%	25%	177,22%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conve	P/M	92,00%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							100,28%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	89,25	14%	100%	100,28%	100,28%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							115,43%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	98,11%	14%	100%	115,43%	115,43%	hijau
7b-CP	Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti	P/M							abu-abu
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,03%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M							abu-abu
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75%	89,26	14%	50%	11901,33%	120,00%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	99,00	14%	50%	123,75%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,25%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,50%	95,74%	14%	100%	100,25%	100,25%	hijau
10b-N	Persentase tindaklanjut temuan BA 15	P/M							abu-abu
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,18%	hijau